

FORM HALAMAN DEPAN IUJK

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
IZIN UAHA JASA KONSTRIKSI NASIONAL
NOMOR :.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kota Bitung menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telpon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai tanggal.....

Foto Penanggung Jawab
Badan Usaha

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A.n. Walikota
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP.....

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN Ib : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK

Nomor IUJK :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (JUTA Rp)

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL

Nomor : , 20..
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kota
.....
.....
Di.....

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomortanggal.....perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sertifikat No.....tanggal.....dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor :
Lampiran : -

Tanggal.....

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di- Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor.....Tanggal....., perihal seperti.....(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah.....Nomor :tanggal..... tentang.....;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan izin usaha jasa konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor.....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*)

ttd

.....

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 20 Desember 2013
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR INDUK PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:
 Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
 1 = Jasa Perencanaan
 2 = Jasa Pelaksanaan
 3 = Jasa Pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kota dimulai dari 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kota Surakarta : 3372
3. Jenis usaha : 2 (jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha

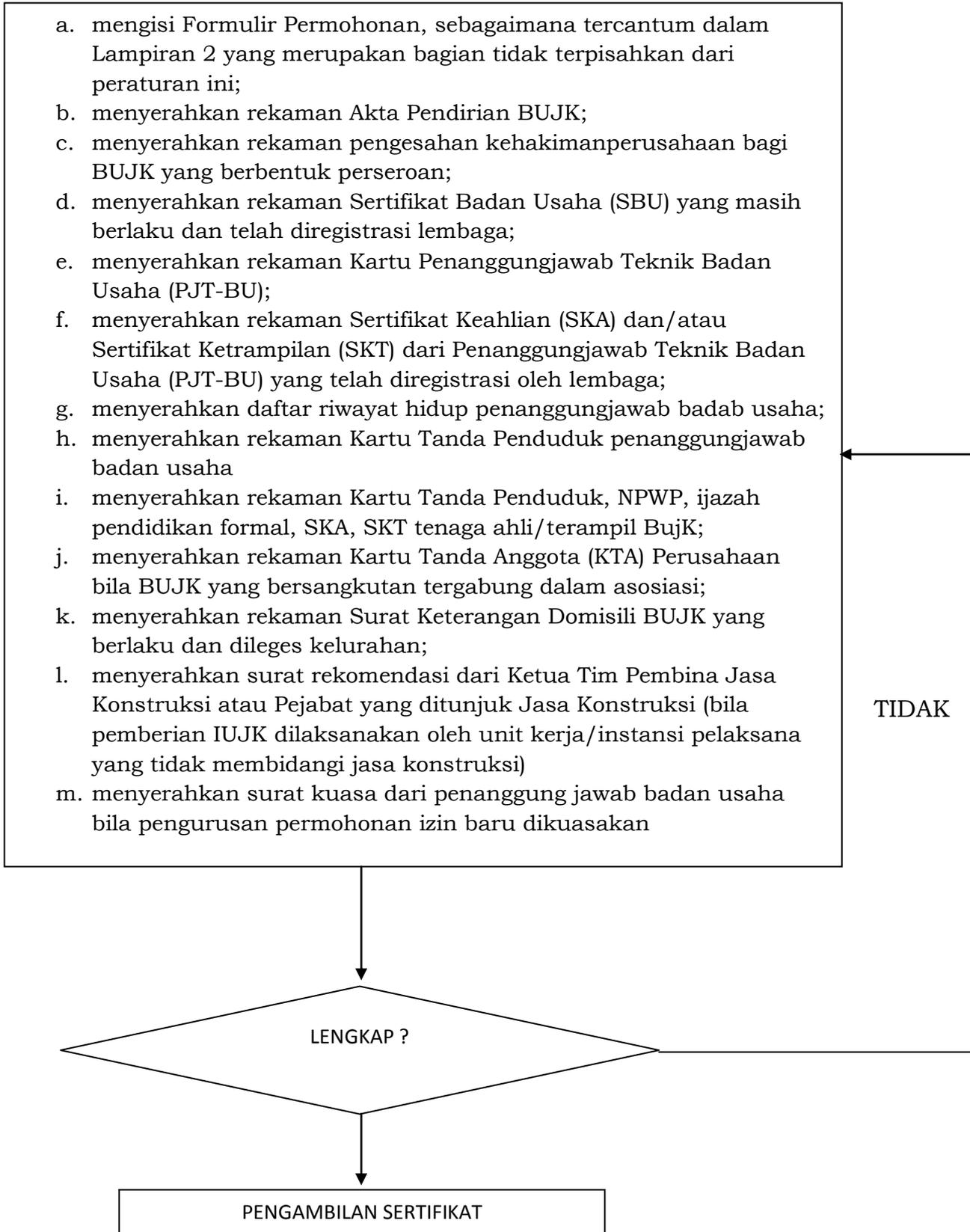
1-3372-2-00811-809465

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Izin Baru



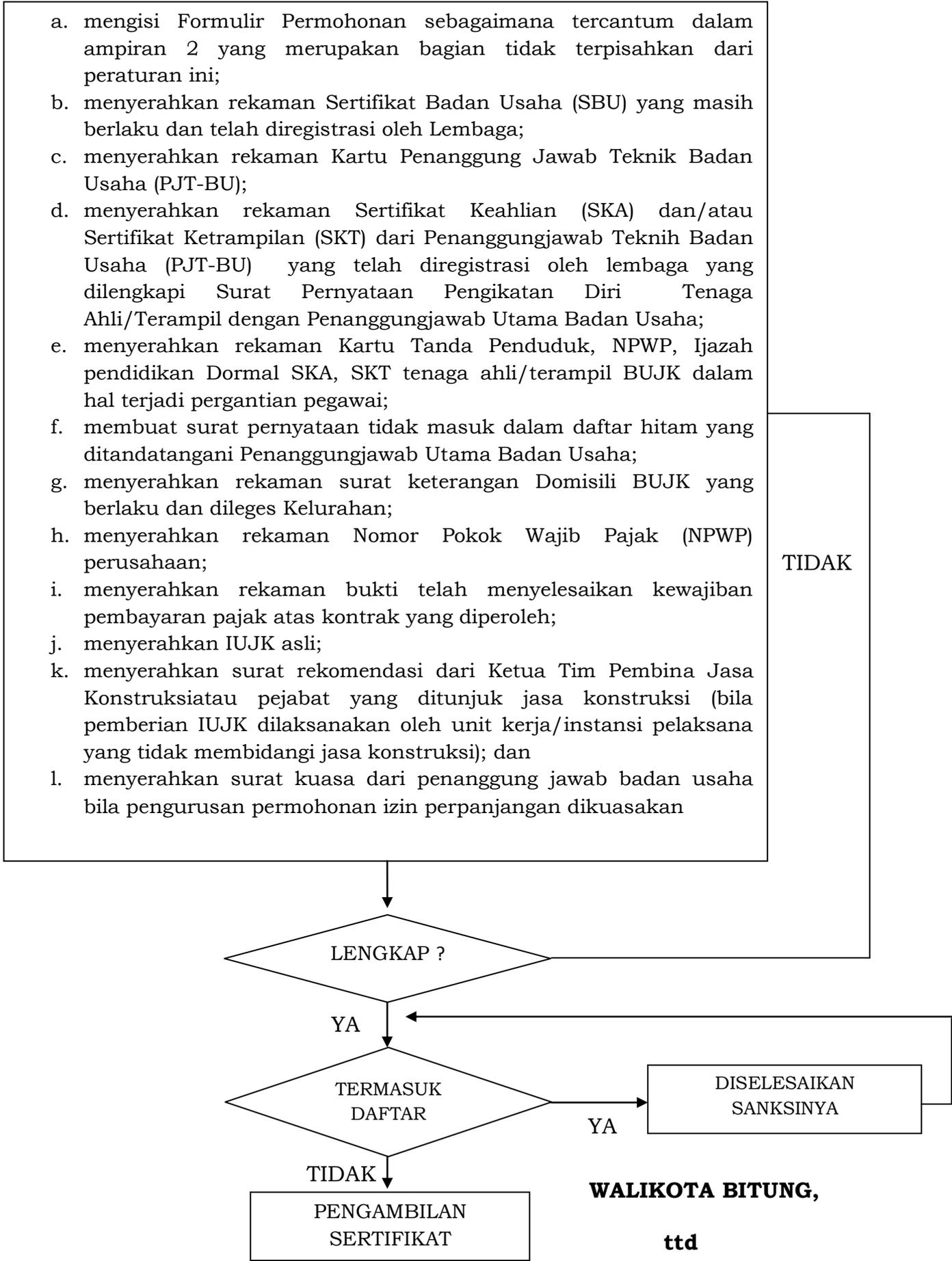
WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN VIb : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 20 Desember 2013
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



WALIKOTA BITUNG,
ttd
HANNY SONDAKH

LAMPIRAN VIc : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Perubahan Data

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. Mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- c. Menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan Nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha
- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan

PENGAMBILAN SETIFIKAT

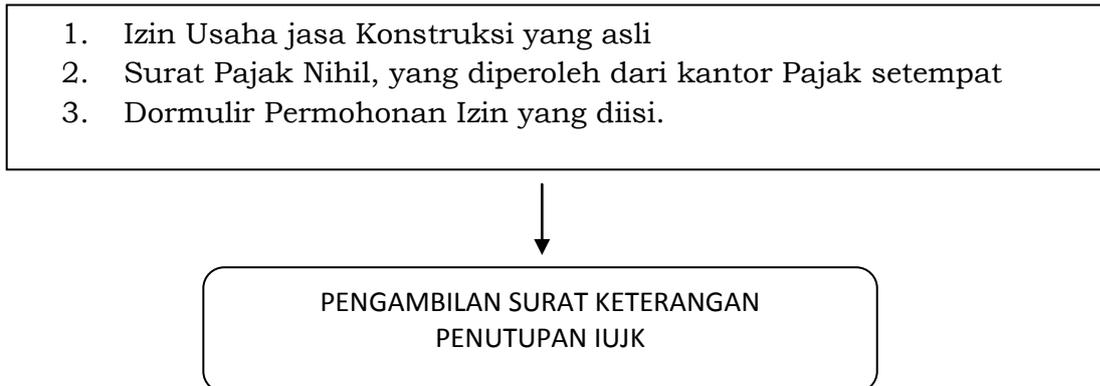
WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN VI d : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN



WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama pengguna jasa, Alamat, kota, telp	Nama pekerjaan Mulai-selesai pekerjaan	Nilai pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1 =% Bulan ke-2 =% Bulan ke-3 =% Bulan ke-4 =% Bulan ke-5 =% Bulan ke-6 =%		Bulan ke-1 =% Bulan ke-2 =% Bulan ke-3 =% Bulan ke-4 =% Bulan ke-5 =% Bulan ke-6 =%	[[[

..... , 20..

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBD)

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 20 Desember 2013
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
 PEMBERI IUJK WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KOTA BITUNG
 TAHUN :
 SEMESTER KW :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/periode bulan	Jumlah dokumen permohonan (total) Selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakuan Kembali	Jumlah keseluruhan s/d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa usaha pelaksana= 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4.Jumlah Usaha Orang Perseorangan

Catatan :

....., tgl.....

Instansi Penerbit

.....

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013

TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KOTA BITUNG

TAHUN :

SEMESTER KW :

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/periode bulan	Jumlah dokumen permohonan (total) Selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan Kembali IUJK	Jumlah keseluruhan s/d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa pelaksana= 3. Jasa usaha Pengawasan=	

....., tgl.....

Pemerintah Kota

.....

WALIKOTA BITUNG,

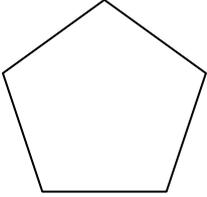
ttd

HANNY SONDAKH

Catatan :

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG		
		
LOGO KOTA BITUNG		
KOP INSTANSI PEMBERI IUJK		
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR:		
Nama :		
Tempat/Tgl.Lahir :		
Alamat :		
No SKA/SKT :		
Klasifikasi/Subklasifikasi :		
Kualifikasi/Sunkualifikasi :		
Tanda Tangan Pemegang Kartu	 FOTO, 20.. PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
		TTD NAMA NIP

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 20 Desember 2013
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO. SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI

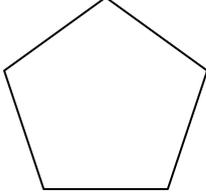
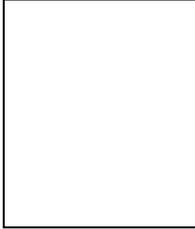
NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KOTA BITUNG	
	KOP INSTANSI PENERBIT IUJK
Logo Kota Bitung	
KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR :	
NAMA	:
TEMPAT/TGL.LAHIR	:
ALAMAT	:
NO SKA/SKT	:
NAMA BUJK	:
NO.IUJK	:
TANDA TANGAN PEMEGANG KARTU	
, 20.. INSTANSI.....
	TTD NAMA NIP

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

